

SKRIPSI
BALEH JALANG DALAM PERKAWINAN BAJAPUIK
DI KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

Oleh :
FAJAR PRATAMA
2010113078

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA & ADAT (PK III)



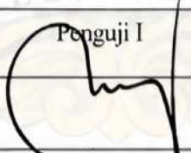
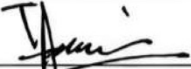
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

	No. Alumni Universitas	FAJAR PRATAMA	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Cacang Tinggi/10 Desember 2001 b. Nama Orangtua : Syamsul Koto & Nofiar Linda c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Adat dan Islam e. No. BP : 2010113078		f. Tanggal Lulus : 2026 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 6 Tahun i. IPK : 3.4 j. Alamat : Tikau Utara Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam

ABSTRAK

Perkawinan bajapuik adalah tradisi adat Minangkabau yang melibatkan pemberian uang japuik oleh pihak perempuan kepada keluarga laki-laki dan diikuti dengan pemberian baleh jalang sebagai bentuk balasan. Namun, pelaksanaannya di temukan jika baleh jalang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan, hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, untuk itu peneliti merumuskan permasalahan (1) bagaimana pengaturan dan pelaksanaan baleh jalang di Kecamatan Pariaman Tengah, dan (2) bagaimana akibat hukum baleh jalang jika tidak dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan penelitian deskriptif, melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan ninik mamak, alim ulama, dan tokoh adat. Hasil penelitian rumusan masalah satu menunjukkan bahwa baleh jalang diatur melalui musyawarah adat dengan prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, yang mengedepankan kesetaraan dan penghormatan antar keluarga, tujuannya adalah untuk mengetahui apabila baleh jalang tidak dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan di dalam keluarga mempelai serta menimbulkan sanksi adat berupa denda, cicilan emas, pembatasan partisipasi dalam alek adat, dan pencatatan cacat adat, yang bersifat restoratif untuk memulihkan marwah dan menjaga keharmonisan antar keluarga. Baleh jalang tetap dilaksanakan sebagai bagian dari adat Minangkabau yang adaptif dan fleksibel, meskipun tidak diatur dalam hukum formal, dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dengan sanksi yang bertujuan memulihkan hubungan sosial.

Kata Kunci: Baleh Jalang, Perkawinan Bajapuik, Hukum Adat, Akibat Hukum, Minangkabau

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Fajar Pratama	Prof. Dr. Busyra Azher, S.H, M.H	Tasman, S.H. M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 5 Agustus 2026.

Penguji,
Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara : **Dr. Devianty Fitri, S,H, M.Hum**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

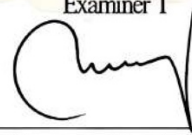
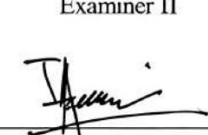
	No. University Alumni	FAJAR PRATAMA	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Cacang Tinggi/10 December 2001 a. Parents Name : Syamsul Koto & Nofiar Linda b. Faculty : Law c. Concentratio : Living Law and islamic civil law d. No. BP : 2010113078	e. Graduation Date : 5 August 2026 f. Predicate : Very Satisfactory g. Length of Study : 6 Years h. GPA : 3.4 i. Address : Tiku Utara, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam	

ABSTRACT

The bajapuik marriage is a Minangkabau customary tradition that involves the giving of uang japuik (bride's payment) by the bride's family to the groom's family, followed by the provision of baleh jalang as a form of reciprocal return. However, in its implementation, it is found that baleh jalang is not always carried out in accordance with prior agreements, which gives rise to various problems. Therefore, this study formulates two main issues: (1) how the regulation and implementation of baleh jalang are conducted in Pariaman Tengah District, and (2) what the legal consequences are if baleh jalang is not fulfilled. The method used in this research is a socio-juridical approach with a descriptive research design is conducted through literature study and in-depth interviews with traditional leaders (ninik mamak), religious scholars (alim ulama), and community figures. The results of the first problem indicate that baleh jalang is regulated through customary deliberation based on the principle of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (custom founded upon Islamic law, and Islamic law founded upon the Qur'an), which emphasizes equality and mutual respect between families. Furthermore, if baleh jalang is not implemented, it may cause disputes within the families of the bride and groom and result in customary sanctions. These sanctions may take the form of fines, installment payments in gold, restrictions on participation in customary ceremonies (alek adat), and the recording of customary defects. Such sanctions are restorative in nature, aimed at restoring dignity (marwah) and maintaining harmony between families. Although baleh jalang is not regulated under formal law, it continues to be practiced as part of the adaptive and flexible Minangkabau customary system. Any discrepancies in its implementation can be resolved through customary mechanisms, with sanctions intended to restore social relations.

Keywords: Baleh Jalang, Bajapuik Marriage, Customary Law, Legal Consequences, Minangkabau

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August, 5th 2026 Examiner.

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Fajar Pratama	Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H M.H	Tasman, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the number:

	Faculty/University	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature :
No. Alumni University:	Name:	Signature :